



PROSIDING

PENELITIAN

Tema:

“Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Diseminasi Hasil Penelitian Terapan”

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**

Lampung, 15 November 2018

ISBN 978-602-53436-1-2



Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper 2018

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Tema:

“Pengabdian Pada Masyarakat Melalui Desiminasi Hasil - Hasil Penelitian Terapan”

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si
Pengaruh : Dr. Mahrinasari, S.E., M.SBA
Dr. Fajar Gustiawati Dewi, S.E., M.Si.Akt
Dr. Ambya, S.E., M.Si
Dr. Nairobi, S.E., M.Si
Dr. Farichah, S.E., M.Si.Akt
Dr. RR Erlina, S.E., M.Si

Pelaksana
Ketua : Dr. Marselina, S.E., MPM
Wakil Ketua : Prayudha Ananta, S.E., M.M
Sekretaris : Usep Syaipudin, S.E., M.Si
Wakil Sekretaris : Afri, S.E., MM
Bendahara : Emi Maimunah, S.E., M.Si
Seksi-Seksi
Sie Acara Semnas : Ninuk, S.E., M.Si.Akt
Sie Kesekretariatan : Zulfa Emalia, S.E., M.Sc
Sie Prosiding : Sahidin, S.E
Sie Management /Panel Class : Zainur M.Rusdi, S.E., M.Si
Dina, S.E., M.Si
Sie Penerimaan Artikel Koordinator : Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si
Akuntansi : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si
Yunia
Manajemen : Dwi Asri, S.E., M.Si
Yuniarti Fihartini, S.E., M.M
Ekonomi Pembangunan : Dr. Arivina Ratih, S.E., M.Si
Pendukung Kesekretariatan : Mimi Efita Gusmiati, S.E
Elvi, S.E., M.M
Penyunting : Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si
Dr. Erni Hendrawati, S.E., M.Si
Dr. Rindu Ekagamayuni, S.E., MSi.Akt
Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.E
Dr. Ida Budiarti, S.E., M.E

Penerbit

FEB, Universitas Lampung

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.01 Bandar Lampung

Telp : 0721-704622

Website : feb.unila.ac.id

Peran Bum Desa Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan

Liliana, Abdul Bashir, Nurul Aulia

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Pembentukan BUMDes diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di desa. Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai aset ekonomi dari desa, sehingga harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Maka dari itu, BUMDes dijalankan oleh masyarakat desa dan memerlukan keterlibatan masyarakat desa tersebut didalamnya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. Fokus dalam penelitian ini akan membahas peranan Dana Desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan BUM Desa yang tepat dalam mendukung kemandirian ekonomi. Dari hasil survey sebagian desa telah mengembangkan dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu cara desa untuk menambah Pendapatan dari usaha desa itu sendiri.

Key words: BUM Desa, Kemandirian Ekonomi, dan Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa memiliki posisi yang strategis sebagai pilar pembangunan nasional sebagai satuan politik terkecil dari pemerintahan. Adanya ketersediaan sumber daya alam yang melimpah menjadikan desa memiliki potensi untuk dikembangkan yang selanjutnya dapat membawa desa-desa tersebut menjadi desa yang mandiri. Ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah serta menggelontorkan berbagai dana untuk pembangunan desa, agar desa-desa tersebut mampu menuju kearah yang lebih baik, salah satunya melalui pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dengan adanya BUMDes diperkuat juga melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam BAB X pasal 87-90 antara lain yang menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Dengan adanya pembentukan BUMDes diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di desa. Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai aset ekonomi dari desa, sehingga harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Maka dari itu, BUMDes dijalankan oleh masyarakat desa dan memerlukan keterlibatan masyarakat desa tersebut didalamnya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-

permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa (Ramadana dkk, 2013).

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian mengenai BUMDes sudah banyak di teliti dari berbagai pihak. Diantaranya ialah Ramadana, Ribawanto, dan Suwondo (2013) mengkaji mengenai Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai penguatan ekonomi desa (studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, penelitian ini berfokus pada (1) keberadaan Badan Usaha Milik Desa (2) kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa (3) faktor penghambat dan pendukung. Hasil penelitian ini ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja.

Pengembangan desa mandiri melalui BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (studi kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan) yang dikaji oleh Kirowati dan Dwi (2018), menunjukkan bahwa adanya manfaat yang dirasakan dari pengembangan badan usaha milik desa (BUMDES) oleh warga desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan seperti, menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat, serta adanya peran yang terbentuk atas modal sosial dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES) yang meliputi kepercayaan, Jaringan yang berbentuk tanggung renteng merupakan jaringan sosial yang erat memperkuat kerjasama, dan norma yang tercermin saling bantu membantu telah di terapkan dengan baik dalam pengelolaan BUMDes di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Kajian mengenai optimalisasi dana desa dengan pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) menuju desa mandiri, yang dikaji oleh Nugrahaningsih, Falikhatun, dan Winarna (2016). Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan hasil yang diperoleh bahwa pertama, terkait dengan implementasi Dana Desa, maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdayaguna. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Kedua, BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Selanjutnya yang ketiga ditemukannya beberapa kendala antara lain adanya perbedaan paradigma dari Stakeholder terkait dengan pengelolaan Dana Desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi program kerja BUM Des, dan kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan rencana kerja dan laporan keuangan Bum Des.

Kontribusi Bumdes dalam Pembangunan Ekonomi Desa yang dikaji oleh Basri (2016), menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif pada kajiannya. Hasil dari kajian ini mengungkapkan bahwa kehadiran negara dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Banglas melalui pembentukan BUMDes Banglas Bestari memiliki tiga manfaat, yakni Penambahan PADes, Mengurangi Monopoli Usaha oleh kelompok tertentu, dan adanya upaya Pembangunan Desa secara mandiri. Dengan demikian, peran negara (pemerintah) dalam membangun ekonomi di Desa Banglas sudah dimulai dari pelaku ekonomi terkecil. Terdapat beberapa masalah peranan Negara dalam membangun ekonomi di Desa Banglas, yaitu Sejak menjadi BUMDes SHU selalu mengalami penurunan, berkurangnya alokasi SHU untuk dana sosial, berkurangnya dana alokasi SHU untuk pembangunan desa, dan adanya stagnasi jumlah tunggakan.

Selanjutnya, kajian mengenai analisis pelaksanaan program *Social Enterprise* di BUMDES Nglanggeran oleh Khosyi, Nurrohman, dan Fahmi (2018). Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini berupa penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, maka hasil yang diperoleh ialah adanya kegiatan social enterprise di dalam BUMDes Nglanggeran yang mana sangat berperan dalam berkembangnya perekonomian masyarakat di desa Nglanggeran itu sendiri.

Atmojo dan Hendrijanto (2015) mengkaji mengenai peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa (studi kasus pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi), maka hasil yang ditemukan ialah Peranan-peranan pemberdayaan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang memerlukan bantuan modal usaha agar bisa memiliki usaha sendiri dengan begitu mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya dalam program pemberdayaan BUMDes membentuk program bersama dengan para anggotanya, dalam hal ini pengurus, anggota dan masyarakat sudah berperan aktif dalam seluruh kegiatan pemberdayaan tersebut serta dapat memberikan solusi dan masukan bagi keperluan/ kebutuhan mereka sendiri. Upaya Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yaitu memiliki beberapa program untuk anggota-anggotanya, yaitu antara lain: 1. Simpan Pinjam/Permodalan 2. Persewaan tanaman jeruk dan penanaman buah naga 3. Peternakan hewan.

Agunggunanto, Arianti, Kushartono, dan Darwanto (2016) mengkaji mengenai pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). Hasil dari kajian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan deskriptif.

Pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan agar mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara.

Fokus dalam penelitian ini akan membahas mengenai:

1. Untuk mengetahui peranan Dana Desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.
2. BUM Desa yang tepat dalam mendukung kemandirian ekonomi.

PEMBAHASAN

Dari output penelitian tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), peneliti mendapatkan hasil dengan melakukan survey di dua Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Ogan Ilir dan Musi Banyuasin. Jumlah desa yang dikunjungi sebanyak 20 desa dari beberapa kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir dan Musi Banyuasin.

Kemudian dalam hasil kunjungan ke desa-desa, peneliti mendapatkan informasi bahwasanya jabatan dari para responden memiliki tingkatan jabatan yang beraneka ragam mulai dari Kepala Desa, Direktur BUMDesa, Sekretaris Desa dan Lainnya. Berikut ini gambaran umum tentang responden dan informasi lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Jabatan Responden

No	Jabatan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Kepala Desa	4	20%
2.	Direktur BUMDesa	8	40%
3.	Sekretaris Desa	7	35%
4.	Lainnya	1	5%
Total		20	100%

Sumber: Data lapangan, 2018

Dari output yang di hasilkan, sebanyak 20 responden dari berbagai tingkat jabatannya terdapat 4 responden yang menjabat sebagai kepala desa, kemudian 8 responden menjabat sebagai direktur BUMDesa, lalu 7 orang responden menjabat sebagai sekretaris desa, dan yang menjabat sebagai lainnya terdapat 1 orang responden.

Tabel 2. Pendidikan Responden

No	Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase
1.	SMA	9	45%
2.	D3-D4	1	5%
3.	S1	9	45%
4.	S2	1	5%
Total		20	100%

Sumber: Data lapangan, 2018

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan responden, lalu diketahui tingkat pendidikan yang ditempuh oleh responden. Responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA berjumlah 9 orang responden, kemudian responden yang menempuh jenjang pendidikan D3-D4 berjumlah 1 orang, lalu pendidikan S1 berjumlah 9 orang responden, dan responden yang telah menempuh jenjang pendidikan S2 berjumlah 1 orang.

Tabel 3. Pelatihan Keuangan

Pelatihan Keuangan	Jumlah	Persentase
Ya	20	100%
Total	20	100%

Sumber: Data lapangan, 2018

Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada pejabat desa yang turut dalam pengembangan BUMDesa, bahwasannya seluruh pejabat desa yang turut dalam pengembangan BUMDesa seluruhnya pernah mendapatkan pelatihan keuangan

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Hasil penelitian ke lapangan berkaitan dengan pengelolaan dan pembinaan posyandu pada tahun 2018 sebanyak 35% desa mengalokasikan dana desa mereka untuk pengelolaan dan pembinaan posyandu sementara 65% lainnya tidak mengalokasikan dana pada pembinaan posyandu di desa. Pengelolaan dan Pembinaan dilakukan dalam bentuk memberikan makanan tambahan kepada peserta posyandu.

Tabel 4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No	Keterangan	Jawaban		
		Ya	Tidak	Total
A.	Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes	3 (15%)	17 (85%)	20 (100%)
B.	Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	4 (35%)	15 (65%)	20 (100%)
C.	Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini	6 (12%)	14 (88%)	20 (100%)

Sumber: Data lapangan, 2018

Pada pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang di proyeksikan sebagai dasar dari pendidikan desa khususnya

untuk anak-anak, hanya 6 desa yang menggunakan dana desanya untuk pembinaan dan pengembangan PAUD sementara 14 desa lainnya pada tahun 2018 tidak mengalokasikan dana untuk pengelolaan dan pembinaan PAUD di desa. Di keempat desa yang menggunakan dananya untuk pembinaan dan pengembangan PAUD karena menurut mereka PAUD masih perlu dibantu karena belum memiliki fasilitas yang cukup. Sementara Desa lain yang tidak mengalokasikan dananya untuk PAUD karena menurut pihak yang diwawancarai tidak semua desa memiliki PAUD, ataupun karena PAUD di desa tersebut sudah berjalan cukup baik sehingga prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk kegiatan yang lain yang menurut mereka lebih prioritas.

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Tabel berikut ini menunjukkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana.

Tabel 5. Pembangunan Sarana dan Prasarana

No	Keterangan	Jawaban		
		Ya	Tidak	Total
1.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa	15 (75%)	5 (25%)	20 (100%)
2.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani	-	20 (100%)	20 (100%)
3.	Pembangunan dan pemeliharaan embung desa	-	20 (100%)	20 (100%)
4.	Pembangunan energi baru dan terbarukan	-	20 (100%)	20 (100%)
5.	Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan	4 (20%)	16 (80%)	20 (100%)
6.	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa	9 (45%)	11 (55%)	20 (100%)
7.	Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier	4 (20%)	16 (80%)	20 (100%)

8.	Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan	1 (5%)	19 (95%)	20 (100%)
9.	Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa	2 (18%)	18 (90%)	20 (100%)

Sumber: Data lapangan, 2018

Dari 20 desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini, terdapat 15 desa (75%) yang mengalokasikan dana desa untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan akses desa. Hanya 5 desa (25%) yang tidak mengalokasikan dana desanya pada pembangunan jalan desa, yaitu desa Bumi Kencana, desa Mulyorejo, desa Linggosari, desa Sumber Rezeki, desa Sri Gunung.

Untuk pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan seperti membangun parit, pembangunan dinding penahan longsor di pinggir sungai dan lainnya ada 4 desa (20%) yang melakukan pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan tersebut dan sisanya sebanyak 16 desa (80%) tidak melakukan pembangunan dan juga pemeliharaan pada sanitasi lingkungan pada tahun 2017. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa seperti pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih desa dilakukan oleh 9 desa yaitu desa Nusa Sersan, desa Sakatiga, desa Suka Mulia, desa Payakabung, desa Purna Jaya, desa Muara Penimbung Ilir, desa Tanjung baru, desa Cinta Damai, serta desa Lingo Sari. Sementara 11 desa lainnya tidak melakukan pengelolaan dan pembangunan sarana air bersih di tahun 2017. Lalu ada pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier yang dilakukan oleh empat desa dan 16 desa lainnya tidak melakukan pembangunan ataupun pengelolaan irigrasi.

Adapula sebanyak satu desa mengalokasikan dana desa untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan yaitu desa Mekar Jadi dan 19 desa lainnya tidak mengalokasikan dana desa untuk kegiatan ini. Dari 20 desa, hanya dua desa yang mengalokasikan dana desa untuk sarana dan prasarana.

Tidak ada satupun desa yang mengalokasikan dana desa untuk kegiatan pembangunan dan

pemeliharaan jalan usaha tani, embung desa, serta pembangunan energi baru dan terbarukan. Tidak adanya pengalokasian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan serta embung desa jalan usaha tani dikarenakan dari 20 desa tersebut petani bukan merupakan mata pencaharian utama dari desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan energi baru dan terbarukan belum menjadi prioritas bagi mereka. Dari hasil wawancara kepada informan, mereka kebanyakan belum paham apa itu energi baru dan terbarukan. Ketika diberikan contoh bentuk-bentuk energi terbarukan mereka menganggap itu belum menjadi prioritas. Meskipun mereka menyadari bahwa suatu saat hal ini akan menjadi penting tapi tidak sekarang. Hal lain menurut mereka lebih banyak kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan di desa yang lebih penting dari energi baru dan terbarukan. Jika pemerintah menganggap itu penting menurut beberapa informan seharusnya ada proyek/kegiatan dari pemerintah dalam bentuk dana yang lain.

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Tabel 6. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

No	Keterangan	Jawaban		
		Ya	Tidak	Total
1.	Pendirian dan Pengembangan BUMDesa	12 (60%)	8 (40%)	20 (100%)
2.	Pembangunan dan Pengelolaan pasar desa/kios desa	1 (5%)	19 (95%)	20 (100%)
3.	Pembangunan dan pengelolaan air bersih desa	5 (25%)	15 (75%)	20 (100%)
4.	Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan	0 (0%)	20 (100%)	20 (100%)
5.	Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa	0 (0%)	20 (100%)	20 (100%)
6.	Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan	1 (5%)	19 (95%)	20 (100%)
7.	Pengembangan benih lokal	-	20 (100%)	20 (100%)
8.	Pengembangan ternak secara kolektif	-	20 (100%)	20 (100%)

9.	Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri	0 (0%)	20 (100%)	20 (100%)
10.	Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu	-	20 (100%)	20 (100%)
11.	Pengelolaan padang gembala	-	20 (100%)	20 (100%)
12.	Pengembangan desa wisata	1 (5%)	19 (95%)	20 (100%)
13.	Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan	1 (5%)	19 (95%)	20 (100%)
14.	Pengembangan sektor industri kecil dan menengah	2 (10%)	18 (90%)	20 (100%)
15.	Pengembangan BUMDesa lainnya	5 (25%)	15 (75%)	20 (100%)

Sumber: Data lapangan, 2018

Dari 15 kegiatan yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal hanya lima kegiatan yang terdapat atau dilakukan oleh desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Kegiatan tersebut adalah: 1) Pendirian dan pengembangan BUM Desa; 2) Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa/ kios Desa; 3) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa; 4) Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 5) Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Dari total 20 desa yang di survey, terdapat 12 desa yang mengembangkan dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu Desa Lingasari, Mekarjadi, Muara Penimbang Iilir, Muara Penimbang Ulu, Mulyo Rejo, Nusa Sersan, Paya Kabung, Purna Jaya, Sakatiga, Suka Mulia, Sukadamai Baru, dan Tanjung Baru sebagai salah satu cara desa untuk menambah Pendapatan dari usaha desa itu sendiri sedangkan 8 desa lainnya belum memiliki dan mengembangkan BUMDes mereka pada tahun 2018. Kemudian untuk pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan desa dari 20 desa yang ada belum atau tidak melakukan pengembangan atau pengelolaan lumbung pangan desa. Terdapat 1 desa yang mengadakan kegiatan pembuatan pupuk organik untuk pertanian yaitu Desa Mekar Jadi. Kegiatan pembangunan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian

dan perikanan juga sudah di lakukan oleh 1 desa yaitu Desa Permata Baru.

Dari survey lapangan ternyata tidak ada satu desapun yang melakukan pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengembangan benih local, pengembangan ternak secara kolektif, pembangunan energy mandiri, pembangunan tambatan perahu dan pengelolaan padang gembala. Namun, ada satu desa yang melakukan pengelolaan desa wisata tahun 2018.

PEMANFAATAN SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN

Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya lingkungan berkelanjutan, dari semua desa yang menjadi objek penelitian terdapat 3 desa yang menggunakan dana desa untuk kegiatan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Desa No 5 Tahun 2015. Kemudian terdapat 1 desa yang mengalokasikan dananya untuk pengelolaan sampah.

Tabel 7. Pemanfaatan Sumber Daya dan Lingkungan di Sekitar Desa

No	Keterangan	Jawaban		
		Ya	Tidak	Total
A.	Komoditas tambang mineral bukan logam	3 (15%)	17 (85%)	20 (100%)
B.	Komoditas tambang batuan	-	20 (100%)	20 (100%)
C	Komoditas perairan	-	20 (100%)	20 (100%)
D.	Komoditas pertanian dan perkebunan	-	20 (100%)	20 (100%)
E.	Hutan milik desa	1 (5%)	19 (95%)	20 (100%)
F.	Pengelolaan sampah	-	20 (100%)	20 (100%)

Sumber: Data lapangan, 2018

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Tabel berikut ini menggambarkan prioritas penggunaan Dana Desa secara khusus yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel 8. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Keterangan	Jawaban		
		Ya	Tidak	Total
A	Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa	20 (100%)	-	20 (100%)
B	Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya	6 (30%)	14 (70%)	20 (100%)
C	Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 (20%)	16 (80%)	20 (100%)
D	Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa	4 (20%)	16 (80%)	20 (100%)
E	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	3 (15%)	17 (85%)	20 (100%)
F	Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan	5 (25%)	15 (75%)	20 (100%)

	Kemasyarakan			
G	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	-	20 (100%)	20 (100%)

Sumber: Data lapangan, 2018

Dari tujuh kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa, semua kegiatan dilakukan oleh desa. Namun demikian kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 25% desa yang menjadi objek penelitian. Diikuti oleh kegiatan Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa yang dilakukan oleh 100% desa. Hal ini bermakna bahwa desa memberikan perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan yang bertujuan pada pemberdayaan masyarakat desa.

Dukungan desa terhadap pengembangan BUMDesa maupun kelompok usaha masyarakat hanya ada 6 desa yaitu Desa Linggosari, Mulyorejo, Payakabung, Nusa Sersan, Sukadamai Baru, dan Mekarjadi yang melakukannya hal ini terjadi karena masih sedikit desa yang memiliki Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) lalu ada 14 desa yang belum melakukan pengembangan BUMDes atau pun kelompok usaha rakyat. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa terdapat 4 yaitu desa Sukadamai Baru, Nusa Sersan, Mulyorejo, dan Permata Baru yang mengalokasikan dananya untuk pembentukan dan peningkatan kapasitas kader desa dan sisanya sebanyak 16 desa belum melakukannya. Kemudian untuk pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga desa ada 4 desa yaitu Desa Muara Penimbang Ulu, Tanjung Baru dan Muara Penimbang Ilir yang mengalokasikan dananya untuk itu dan sisanya 16 desa lainnya belum melakukannya.

Kemudian dalam penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat ada 3 desa yang menyelenggarakan kegiatan yaitu desa Purna Jaya, Suka Mulia, dan Muara Penimbang Ulu lalu 17 desa lainnya belum melakukannya. Kemudian untuk dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa, tidak ada satu desa pun yang melakukannya karena tidak ada satu desa pun yang memiliki hutan desa. Dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, dari 20 desa yang ada belum ada

satupun desa yang mengalokasikan dananya untuk itu.

PENGELOLAAN KEUANGAN

Permendagri No. 113/2014 adalah peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Permendagri No. 113/2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) penatausahaan, 4) pelaporan, dan 5) pertanggungjawaban keuangan desa.

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya penelitian ini akan lebih melihat aspek pengelolaan keuangan dari sisi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pelaksanaan

Tabel di bawah ini menggambarkan aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh semua desa yang menjadi objek penelitian.

Tabel 9. Pelaksanaan

No	Keterangan	Jawaban		
		Ya	Tidak	Total
A	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa	8 (40%)	12 (60%)	20 (100%)
B	Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	6 (30%)	14 (70%)	20 (100%)
C	Pelaksanaan operasional BUMDES di jalankan oleh warga desa dan di awasi oleh perangkat desa	17 (85%)	3 (15%)	20 (100%)
D	Operasional BUMDES di jalankan tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga	14 (70%)	6 (30%)	20 (100%)
E	Pelaksanaan kegiatan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan	20 (100%)	-	20 (100%)

	sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa			
--	---	--	--	--

Sumber: Data lapangan, 2018

Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No. 113/2014. Dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran desa telah dilakukan melalui rekening desa, dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah. Pengajuan kegiatan di sertai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang di verifikasi dan disahkan oleh sekretaris desa. Semua kegiatan telah menggunakan buku bantuan kas. Semua kegiatan diatas telah di lakukan dengan baik oleh semua desa.

Penatausahaan

Terkait dengan penatausahaan, dari keseluruhan desa yang menjadi objek penelitian telah melengkapi penatausahaan dalam pengelolaan keuangan tersebut baik Buku kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban bendahara desa, semua desa telah membuat laporan pertanggungjawaban.

Tabel 10. Kegiatan Penatausahaan

No	Keterangan	Jawaban		
		Ya	Tidak	Total
A	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan 1. Buku Kas Umum 2. Buku Kas Pembantu pajak 3. Buku bank	20 (100%) 3 (15%) 2 (10%)	- 17 (85%) 18 (90%)	20 (100%) 20 (100%) 20 (100%)
B	Bendahara mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	19 (95%)	1 (5%)	20 (100%)

Sumber: Data lapangan, 2018

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berkenaan dengan pelaporan, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi :

- Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.Semester Pertama.
- Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

Keseluruhan desa yang menjadi objek penelitian membuat laporan realisasi tiap semester, serta membuat laporan kekayaan milik desa. Terkait dengan kewajiban kepala desa untuk meenyampaikan kepada Bupati/Walikota apabila ada laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa . Laporan program pemerintah dan pemerintah Daerah yang masuk desa ada 17 desa atau sebanyak 85 persen yang mendapatkannya dan sisanya 3 desa tidak mendapatkan laporan tersebut. Kemudian untuk pertanggungjawaban realisasi APBDes yang di informasikan langsung ke masyarakat terdapat 11 desa yang melakukannya melalui banner yang dipajang di depan kantor kepala desa dan sisanya sebanyak 9 desa tidak melakukannya.

Tabel 11. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

No	Keterangan	Jawaban		
		Ya	Tidak	Total
A.	Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota: 1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tiap semester 2. Laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan 3. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa	20 (100%) 20 (100%) 17 (85%)	- - 3 (15%)	20 (100%) 20 (100%) 20 (100%)
B	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa	11 (55%)	9 (45%)	20 (100%)

	diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat			
--	--	--	--	--

Sumber: Data lapangan, 2018

Peran Dana Desa Terhadap Peningkatan Operasional BUMDES Guna Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa

Tabel 12. Peran Desa Terhadap Peningkatan Operasional BUMDES

No	Keterangan	Jawaban		
		Ya	Tidak	Total
A	Alokasi dana desa di gunakan untuk operasional	9 (45%)	11 (55%)	20 (100%)
B	Keberadaan BUMDES membantu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat desa	14 (70%)	6 (30%)	20 (100%)
C	Dana desa di gunakan untuk meningkatkan produksi BUMDES	11 (55%)	9 (45%)	20 (100%)
D	Apakah sampai saat ini pelaksanaan BUMDES selalu mengalami peningkatan dalam aspek pendapatn	17 (85%)	3 (15%)	20 (100%)

Sumber: Data lapangan, 2018

Peranan dana desa untuk meningkatkan operasional BUMDES sebanyak 9 desa atau 45 persen dari seluruh desa yang menjadi objek penelitian, yaitu desa Cinta damai, desa

Lingasari, desa Mekar Jadi, desa Mulyo Rejo, desa Nusa Serasan, desa Paya Kabung, desa Pulau Semambu, dan desa Sukadamai Baru.

Adapula pengalokasian dana desa untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat desa diterapkan sebanyak 14 desa, dan 6 desa lainnya tidak melakukannya. Sedangkan, pengalokasian untuk meningkatkan produksi BUMDES sebanyak 11 desa telah mengalokasikan untuk kegiatan tersebut.

Dalam aspek pelaksanaan BUMDES sebanyak 17 desa telah mengalami peningkatan dalam aspek pendapatan. Sedangkan 3 desa lainnya belum dapat melihat adanya peningkatan dikarenakan termasuk baru dalam pembentukannya.

PENUTUP

Dari total 20 desa yang di survey, terdapat 12 desa yang mengembangkan dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu cara desa untuk menambah Pendapatan dari usaha desa itu sendiri sedangkan 8 desa lainnya belum memiliki dan mengembangkan BUMDes mereka pada tahun 2018. Terdapat desa yang mengadakan kegiatan pembuatan pupuk organik untuk pertanian, kegiatan pembangunan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian dan perikanan. Dari survey lapangan ternyata tidak ada satu desapun yang melakukan pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengembangan benih local, pengembangan ternak secara kolektif, pembangunan energi mandiri, pembangunan tambatan perahu dan pengelolaan padang gembala. Terdapat satu desa yang melakukan pengelolaan desa wisata tahun 2018.

DAFTAR PUSTKA

- Agunggunanto, E. Y. *et al.* (2016) 'Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)', *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(No 1), pp. 67–81. Available at: <http://e-journal.upp.ac.id/index.php/fekon/article/view/378/384>.
- Atmojo, S. T. (2015) 'Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)', *Jurnal Kesejahteraan Sosial*

- Unej*, 1(1), pp. 1–14.
- Basri, A. (2016) ‘Kontribusi BUMDES dalam Pembangunan Ekonomi Desa’, *Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 14(September), pp. 168–174.
- Coristya Berlian Ramadana, heru R. dan S. (2010) ‘Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)’, *Administrasi Publik*, 1(6), pp. 1068–1076.
- Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, J. W. (2016) ‘Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) menuju Desa Mandiri’, *Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), pp. 37–45.
- Ramadana, C.B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068-1076
- S, D. K. dan L. D. (2018) ‘Pengembangan Desa Mandiri Melalui BumDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)’, *Akuntansi dan Sistem Informasi*, 1, pp. 15–22.
- Yofais Ahgio Khosyi, A. N. dan R. A. F. (2018) ‘ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM SOCIAL ENTERPRISE’, *Keuangan Publik Islam*, (5), pp. 1–10.